

LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM, DAN PERUM LKBN ANTARA)

Rapat ke	: 15
Masa Persidangan	: III
Tahun Sidang	: 2020 – 2021
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Dewas dan Dirut LPP TVRI serta Dewas dan Dirut LPP RRI secara fisik dan virtual
Hari, Tanggal	: Rabu, 3 Februari 2021
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	: Sartomo, S.S., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt.1, Jalan. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi pencapaian kinerja Dewas dan Dirut LPP TVRI serta Dewas dan Dirut LPP RRI Tahun 2020;2. Realisasi Anggaran Dewas dan Dirut LPP TVRI serta Dewas dan Dirut LPP RRI Tahun Anggaran 2020;3. Persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN Tahun 2021;4. Isu-isu aktual antara lain mengenai:<ol style="list-style-type: none">a. Upaya strategis LPP TVRI dan LPP RRI terkait migrasi penyiaran analog ke digital dalam rangka persiapan menuju digitalisasi penyiaran (<i>analog switch off</i>) Tahun 2022 sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjab. Peran LPP TVRI dan LPP RRI dalam diseminasi informasi dan keberlanjutan pembelajaran jarak jauh.
Hadir	: <ol style="list-style-type: none">1. ... orang dari 52 Anggota Komisi I DPR RI2. <ol style="list-style-type: none">a. Ketua Dewas LPP RRI, Mistam;b. Dirut LPP RRI, M. Rohanudin;c. Ketua Dewas LPP TVRI, Pamungkas Trihadiatmoko;d. Dirut LPP TVRI, Iman Brotoseno;beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 11.27 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. RDP Komisi I DPR RI dengan Dewas dan Dirut LPP TVRI serta Dewas dan Dirut LPP RRI secara fisik dan virtual pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Dewas dan Dirut LPP TVRI dan LPP RRI tentang pencapaian kinerja LPP TVRI dan LPP RRI Tahun 2020. Selanjutnya Komisi I DPR RI memberi apresiasi dan mendorong LPP TVRI dan LPP RRI untuk terus meningkatkan kinerjanya agar menjadikan Lembaga Penyiaran Publik yang mandiri, kuat, handal, professional, serta terdepan.
2. Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Dewas dan Dirut LPP TVRI dan LPP RRI berkaitan dengan:
 - a. realisasi anggaran LPP TVRI sebesar Rp1.201.203.306.533,- (satu triliun dua ratus satu miliar dua ratus tiga juta tiga ratus enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) atau sebesar 93,52% dari Pagu Anggaran LPP TVRI TA 2020 sebesar Rp1.284.385.142.000,- (satu triliun dua ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
 - b. realisasi anggaran LPP RRI sebesar Rp946.139.242.824,- (sembilan ratus empat puluh enam miliar seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) atau sebesar 87,92% dari Pagu Anggaran LPP RRI TA 2020 sebesar Rp1.076.120.781.000,- (satu triliun tujuh puluh enam miliar seratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Selanjutnya Komisi I DPR RI meminta LPP TVRI dan LPP RRI untuk dapat mempertahankan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada TA 2020.

3. Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Dewas dan Dirut LPP TVRI dan LPP RRI tentang perubahan alokasi Pagu Anggaran LPP TVRI dan LPP RRI TA 2021 sebagai dampak *refocusing* dan realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 sebagai berikut:
 - a. perubahan alokasi Pagu Anggaran LPP TVRI TA 2021, yang semula sebesar Rp1.458.212.923.000,- (satu triliun empat ratus lima puluh delapan miliar dua ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.375.800.829.000,- (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus juta

delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dengan penghematan sebesar Rp82.412.094.000,- (delapan puluh dua miliar empat ratus dua belas juta sembilan puluh empat ribu rupiah).

- b. perubahan alokasi Pagu Anggaran LPP RRI TA 2021, yang semula sebesar Rp1.684.132.593.000,- (satu triliun enam ratus delapan puluh empat miliar seratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.577.934.759.000,- (satu triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan penghematan sebesar Rp106.197.834.000,- (seratus enam miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Sehubungan dengan perubahan tersebut, Komisi I DPR RI meminta LPP TVRI dan LPP RRI untuk tetap melaksanakan Program Prioritas Nasional sesuai target dan sasaran yang sudah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

4. Berkaitan dengan penjelasan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran TA 2020, persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN TA 2021 serta isu- isu aktual, Komisi I DPR RI meminta LPP TVRI dan LPP RRI untuk memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Komisi I DPR RI sebagai berikut:
 - a. meningkatkan optimalisasi koordinasi kerja dan kolaborasi Dewas dan Direksi dalam rangka penguatan pengawasan, konsolidasi kerja, dan peningkatan kinerja LPP TVRI dan LPP RRI.
 - b. Meningkatkan peran LPP TVRI dan LPP RRI dalam upaya diseminasi informasi, dukungan terhadap pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh melalui berbagai program belajar, program vaksinasi Covid-19, penegakan protokol kesehatan Covid-19, pencerdasan publik terkait informasi kebencanaan, bahaya radikalisme, dan program penguatan rasa nasionalisme yang menjangkau seluruh wilayah NKRI.
 - c. kesungguhan LPP TVRI dan LPP RRI dalam menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan dalam rangka persiapan menuju digitalisasi penyiaran atau migrasi penyiaran analog (*analog switch off*) Tahun 2022 sesuai amanat UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain: infrastruktur digital (pemancar digital), peningkatan kualifikasi dan SDM Profesional, dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat dalam rangka Penyiaran Digital baik penggunaan *Set Top Box* dan radio penerima digital.
 - d. mendorong percepatan penyelesaian RPP Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran sebagai turunan dari UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta memperhatikan dengan cermat, teliti, hati-hati, dan memberikan keterlibatan publik atas substansi materi muatannya apakah sudah sinkron serta mengakomodir kepentingan berbagai pihak yang terkait.
 - e. mempercepat pembahasan revisi PP No.12 Tahun 2005 tentang LPP RRI dan PP No. 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI sebagai tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI tentang penerapan regulasi terkait tugas dan fungsi organisasi, kepegawaian, serta pelaksanaan anggaran.
 - f. meminta LPP TVRI dan LPP RRI memberikan laporan tertulis terkait Barang Milik Negara/Aset Negara kepada Komisi I DPR RI selama 5 (lima) tahun terakhir dan

proyeksi 5 (lima) tahun ke depan sebagai bagian pengawasan legislatif selambat-lambatnya dua pekan setelah RDP pada hari ini.

5. Komisi I DPR RI meminta jawaban tertulis dari LPP TVRI dan LPP RRI atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi I DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat pada hari ini selambat-lambatnya hari Selasa, 9 Februari 2021.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.33 WIB.

Jakarta, 3 Februari 2021

1. KETUA DEWAS LPP TVRI,

KETUA RAPAT,

PAMUNGKAS TRIHADIATMOKO

DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI
A-442

2. DIRUT LPP TVRI,

IMAN BROTOSENO

3. KETUA DEWAS LPP RRI,

MISTAM

4. DIRUT LPP RRI,

M. ROHANUDIN

